
Studi Partisipasi Digital dalam Kebijakan Publik

Muhammad Ihwan Salsabila

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang

(Jl. Tlogomas, no.264, Malang, Indonesia)

*Corresponding author: squarpentz@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pola partisipasi masyarakat pada kebijakan publik negara di era digital. Metode penelitian yang diterapkan menggunakan Systematic Literatur Riview (SLR) dengan menggunakan 100 artikel bersumber dari database Scopus. Riview atau analisis artikel menggunakan aplikasi VOSviewer untuk melihat trend topik dari tahun ke tahun, negara, penulis, cluster hingga density topik yang sedang dibahas. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terjadi interaksi dua arah (feedback) antara negara dan masyarakat melalui platfrom digital (media sosial) terkait diskusi kebijakan publik dan juga bagaimana terjadi kesenjangan antara ketidaksiapan pemerintah dan masyarakat dalam melakukan transisi digitalisasi. Adanya revolusi digital membuat dunia menggunakan kelebihan teknologi digital dalam berbagai bidang kehidupan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para penggunanya. Tidak terlepas dari pemerintah yang mengadopsi teknologi digital dalam menjalankan tugas dan fungsinya kepada masyarakat. Hal tersebut membuat perubahan konsep tata kelola negara dari Government menjadi Digital Era Governance (DEG). Intervensi digital yang mengubah cara berfikir, bertindak, dan berkomunikasi antara negara kepada rakyatnya memberi kemudahan dimanapun berada. penelitian ini juga mengungkapkan perbedaan pola penggunaan teknologi digital oleh negara berkembang dan negara maju, dimana negara berkembang lebih banyak mengalami trial and error dibandingkan negara maju yang dapat dilihat dari kesiapan pemerintahannya. Hasil penelitian ini berkontribusi pada pengembangan disiplin ilmu pemerintahan yang terkait dengan hubungan negara dan masyarakat melalui partisipasi kebijakan publik, penelitian ini juga lebih memperjelas roadmap penelitian tentang partisipasi digital. Keterbatasan penelitian ini adalah artikel yang digunakan hanya bersumber dari database Scopus dengan penelitian yang dipublish mulai tahun 2020-2023 sehingga temuan penelitian tidak dapat menggambarkan secara komprehensif tentang dinamika, isu atau topik partisipasi digital dalam pelayanan publik. Penelitian berikutnya perlu menggunakan artikel ilmiah yang bersumber dari database internasional bereputasi lainnya, seperti Web of Science dan Dimensions Scholars agar memperjelas penelitian saat ini.

Kata Kunci: Digitalisasi, kebijakan, partisipasi, teknologi

Pendahuluan

Pendahuluan Revolusi digital dunia saat ini membuat banyak perubahan bagi tata Kelola negara. Teknologi digital mengambil peran penting dalam pembaharuan pelayanan negara kepada masyarakat (David dkk., 2023). Negara kini mengadopsi kemampuan dan kecanggihan teknologi digital di berbagai sektor untuk meningkatkan efesiensi, efektifitas, hingga akuntabilitas (Merhi, 2022). Teknologi digital yang menawarkan berbagai fitur didalamnya, termasuk media sosial membuat negara lebih mudah dalam mensosialisasikan kebijakan publik kepada masyarakat. Begitupula masyarakat yang dapat memberikan komentar terhadap berbagai kebijakan publik negara. Hal ini membuat media sosial menjadi arena dimana komunikasi timbal balik antara negara dan masyarakat terjadi feedback (Höchtel & Edelmann, 2022). Negara

mengharuskan adaptif dan collaborative terhadap penggunaan teknologi digital, sehingga dapat membantu dalam peningkatan partisipasi masyarakat modern di era digital saat ini (Ravšelj dkk., 2022). Fenomena tersebut memberi manfaat antara relasi negara kepada partisipasi masyarakat modern dalam menentukan arah program kebijakan publik.

Banyak penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang partisipasi masyarakat dalam era digital yang difokuskan dengan berbagai topik dan isu. Zumofen, Mabillard dan Pasquier (2023) mengungkapkan bahwa partisipasi digital merupakan bentuk komunikasi antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok melalui teknologi digital, dalam pembahasan ini yaitu relasi (komunikasi) antara negara dengan masyarakat. Dilanjutkan dengan penemuan dari Mukhametov (2022) yang menjelaskan dampak dari penggunaan teknologi digital terhadap partisipasi masyarakat kepada negara, dimana hal tersebut berpengaruh kepada pola partisipasi yang inovasi dan collaborative. Homburg dan Moody (2022) juga mengungkapkan adopsi teknologi digital dalam partisipasi masyarakat dan negara china, sebuah negara yang memadukan pemerintahan otoriter dan toleran. Penelitian tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana pemerintahan china menggunakan teknologi digital (media sosial) yang berpengaruh terhadap hubungan masyarakat kepada negara.

Banyak akademisi yang telah mengkaji partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik negara di era digital saat ini. Diantaranya menjelaskan bagaimana konsep-konsep penggunaan teknologi digital yang diadopsi negara dalam kebijakan publik. Konsep umum menjelaskan keterjangkauan teknologi sebagai "Tindakan dan penggunaan yang secara kualitatif lebih mudah atau mungkin dilakukan oleh teknologi" (Galushi & Malatji, 2022). Teknologi digital tersebut membuat negara memproduksi sendiri pesan-pesan multimedia dan mendistribusikan langsung kepada masyarakat dan mengambil Keputusan (Orazgaliyeva dkk., 2023). Masyarakat yang menerima kebijakan publik melalui teknologi digital dapat memberikan pesan (feedback) kepada negara terkait apa yang mereka rasakan dari kebijakan tersebut (Adugna dkk., 2023). Konsep saling tanggap melalui platform digital tersebut membentuk partisipasi warga negara dimanapun mereka berada.

Implementasi nyata konsep penggunaan teknologi digital dapat dilihat Ketika masa pandemi Covid-19. Shen, Cheng dan Yu (2023) menjelaskan platform digital yang disponsori pemerintah dalam memfasilitasi transisi dari ketahanan pemulihan Covid-19 ke ketahanan transformatif. Platform Weijiayuan yang diterapkan di kota Jiaying, Tiongkok memainkan peran penting dengan memberikan informasi-informasi terkait perkembangan, pencegahan hingga pelaporan deteksi Covid-19 kepada masyarakatnya. Hal tersebut serupa dengan program kebijakan publik di Indonesia dalam masa Covid-19, melalui aplikasi Peduli Lindungi yang difasilitasi pemerintah. Masyarakat dapat melakukan konfirmasi deteksi dini Covid-19, serta mendapat konfirmasi validasi kesehatan untuk pergi ke berbagai tempat. Adanya kebijakan tersebut membuat masyarakat lebih mudah melakukan akses kesehatan selama masa pandemi Covid-19.

Kud (2023) dalam studinya di Inggris, Estonia, India, dan Ukraina menjelaskan dampak penggunaan platform modern berbasis blockchain dalam tata kelola publik. Tujuannya adalah untuk memperkuat potensi platform informasi yang terdesentralisasi sebagai alat baru tata Kelola publik untuk meningkatkan partisipasi sadar masyarakat dalam politik publik dan demokrasi. Akan tetapi, disamping dunia mempraktikkan penggunaan platform digital yang terpusat untuk kenyamanan bagi warga negara. Hal tersebut justru menggantikan nilai-nilai nyata demokrasi, sehingga menghilangkan warga negara dari pemerintahan yang sadar oleh negara mereka. Penggunaan platform digital oleh negara pada program kebijakan publik seperti trial and error yang memberikan dampak positif maupun negative kepada masyarakat (Mota Consejero & Janoschka, 2023). Sehingga digitalisasi dalam kebijakan publik bisa menjadi ancaman keberlangsungan nilai-nilai demokrasi, terutama pada negara berkembang yang masih relative rentan sifat demokratis masyarakatnya.

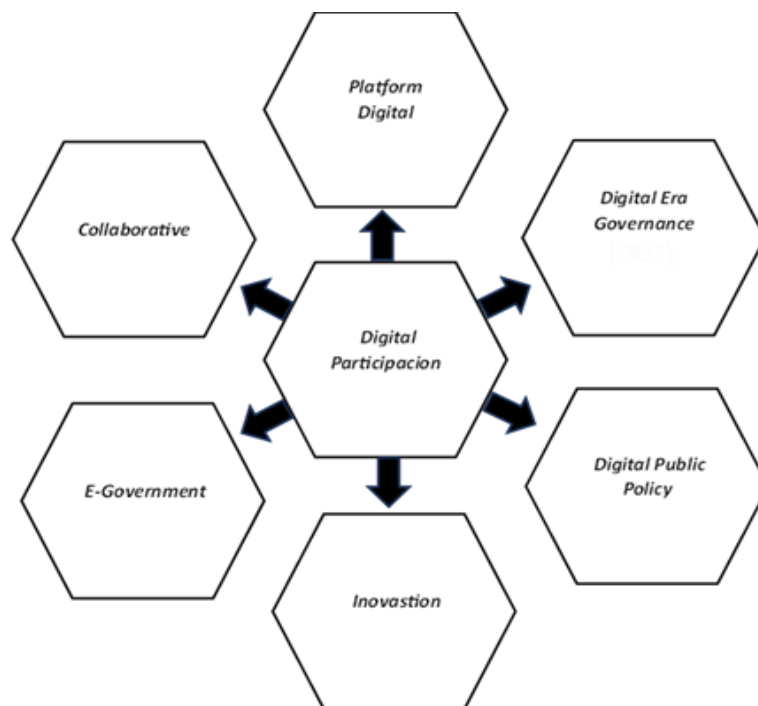
Tian dkk. (2023) dalam penemuannya menjelaskan platform kolaboratif digital yang terdiri dari empat modul untuk membangun pola kerja bagi seluruh pemangku kepentingan (Negara, Masyarakat & Pengusaha) untuk berpartisipasi dalam proses pembaharuan perkotaan di Tiongkok. Akan tetapi platform kolaboratif digital tersebut mendapat berbagai tantangan, seperti kemauan, kapasitas warga, dan kredibilitas karena belum adanya pengaturan yang terlembaga. Oleh karena itu, selain mengadakan transisi ke platform digital negara juga perlu membuat regulasi yang jelas mengenai penerapan teknologi digital pada sektor pemerintahan (Güler & Büyüközkan, 2023). Hal tersebut dilakukan agar adanya pengaturan secara terlembaga untuk memudahkan terciptanya tata Kelola digital. Höchtl dan Edelmann (2022) menunjukkan sejauh mana teknologi digital berperan penting dalam kehidupan dan wawasan berharga yang didapat dengan memahami proses-proses untuk mendukung rancangan inisiatif partisipasi digital terhadap pemerintah dimasa depan. Karena negara dan masyarakatnya dituntut selalu melakukan kolaborasi dalam kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Singh dkk., 2023).

Sameer dkk. (2023) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa masyarakat akan bersedia berpartisipasi dalam Digital Participation ketika kepercayaan dan transparansi terhadap pembuat kebijakan meningkat. Dimana pemerintah harus memberikan fasilitas atau infrastruktur yang memadai dan mendukung masyarakat dalam partisipasi digital. Adanya intervensi teknologi digital membuat pembaharuan tata Kelola publik yang kini disebut Digital Era Governance (DEG), E-Government, atau tata Kelola digital. Ravšelj dkk. (2022) menggambarkan perkembangan DEG dalam dua dekade terakhir (2001-2020), dimana layanan elektronik yang berorientasi pada masyarakat dengan melibatkan partisipasi bahkan menjadi layanan cerdas dengan memfasilitasi teknologi yang sedang berkembang dan disruptif. Adanya platform digital menjadi alternatif masyarakat dalam memberikan aspirasi, saran hingga kritik untuk program kebijakan publik dalam menumbuhkan kreasi bersama, produksi bersama, inovasi, atau transaksi (Renteria & Varela-Castro, 2023). Bahkan partisipasi digital ini bisa mencakup hal yang lebih spesifik dan mendalam (privasi), sebagaimana Davis dkk. (2023) menjelaskan pada tahun 2018 pemerintah Australia mengadopsi strategi 'opt-out' untuk meningkatkan partisipasi dalam My Health Record (MHR) sebuah sistem pencatatan pasien digital nasional. Hal

tersebut tentu memudahkan pemerintah dalam memahami kondisi tingkat kesehatan masyarakatnya dalam skala nasional, sehingga bisa membuat program-program kesehatan nasional secara tepat.

Meskipun platform digital telah digunakan banyak negara, akan tetapi konsep tersebut tidak terlepas dari kritik karena sering kali menyebabkan kurangnya atau penurunan keterlibatan masyarakat. Coelho, Pozzebon dan Cunha (2022) dalam studi kasusnya di tiga kota besar Brazil menjelaskan bagaimana kekuasaan dikaitkan dengan penggunaan sumber daya dalam praktiknya, yaitu dengan sumber daya digital. Platform digital dapat bermanfaat dalam peningkatan partisipasi masyarakat ketika konsep tersebut di orientasikan untuk kepentingan publik bukan untuk arena usaha para pejabat publik atau politik (Schmidhuber dkk., 2022). Perlu adanya komitmen dan kesiapan dari seluruh stakeholder untuk mengadopsi teknologi digital dalam pelayanan publik sehingga dapat memberikan ruang pada partisipasi masyarakat dan mempermudah negara dalam fungsi serta tanggungjawabnya (David dkk., 2023).

Meskipun penelitian terdahulu telah banyak menjelaskan tentang partisipasi masyarakat dalam era digital, namun penelitian terdahulu masih belum banyak yang menggunakan pendekatan Systematic Literature Review dengan artikel yang diambil dari database Scopus serta belum banyak yang menggunakan metode review artikel dengan aplikasi VOSviewer. Karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada review paper dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) menggunakan 100 artikel yang bersumber dari database Scopus. Metode SLR ini akan digunakan untuk mendapatkan gambaran bagaimana pola partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik negara di era digital.



Gambar 1. Digital Partecipacion (Data diolah 2024)

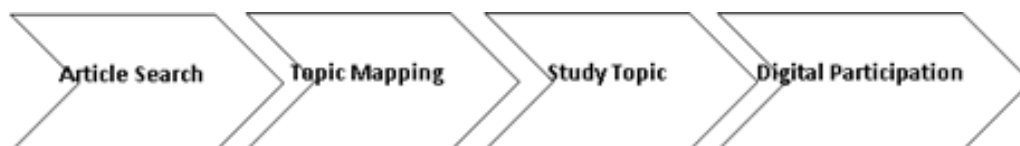
Kerangka penelitian ini dimulai dengan konsep partisipasi digital dalam program kebijakan publik negara. Prinsip-prinsip collaborative dan inovatif mengambil kunci bagi syarat untuk mengadopsi teknologi digital dalam sektor tata kelola kebijakan publik. Sehingga terjadi transisi menuju e-Government dan Digital Public Policy. Platform Digital menjadi arena dalam keberlangsungan partisipasi masyarakat pada penentuan kebijakan publik, sehingga terdapat pembaharuan pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi digital sebagai arena baru dalam partisipasi masyarakat pada kebijakan publik yang dihadirkan negara memberi komunikasi timbal balik (feedback). Dengan melibatkan kemampuan teknologi untuk menuju digitalisasi tata kelola kebijakan publik, maka negara dan masyarakatnya memasuki masa Digital Era Governance (DEG).

Fokus kajian penelitian ini mengarah pada upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu “Bagaimana pola partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik negara di era digital”. Metode penelitian menggunakan kualitatif analisis konten dengan pendekatan Systematic Literatur Rievew (SLR) dan analisis artikel menggunakan VOSviewer. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu, khususnya ilmu pemerintahan yang terkait dengan hubungan negara dan masyarakat dalam bentuk partisipasi dan melihat dinamika kebijakan publik di era digital.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Systematic Literatur Rievew (SLR). Data yang bersumber dari berbagai artikel ilmiah atau jurnal dari database Scopus diproses hingga menjadi karya ilmiah yang menghasilkan manfaat bagi para pembaca. Pendekatan penelitian SLR menggunakan pemetaan topik, pencarian artikel, dan kajian yang relevan bersumber dari database Scopus. Pendekatan metode penelitian Systematic Literatur Rievew (SLR) digunakan karena memenuhi karakteristik penelitian ini, terutama dalam pencarian data secara mendalam sehingga dapat mengidentifikasi seberapa banyak penelitian yang relevan dengan topik.

Tahap pelaksanaan penelitian ini dimulai dengan menentukan topik atau fenomena dengan metode Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses (PRISMA) dilanjutkan dengan mendefinisikan kelayakan tema tersebut. Refrensi penelitian ini ditentukan hanya bersumber dari database Scopus dengan pemilihan artikel dan kajian yang terkait dengan topik. Lihat gambar penjelasan dibawah ini:



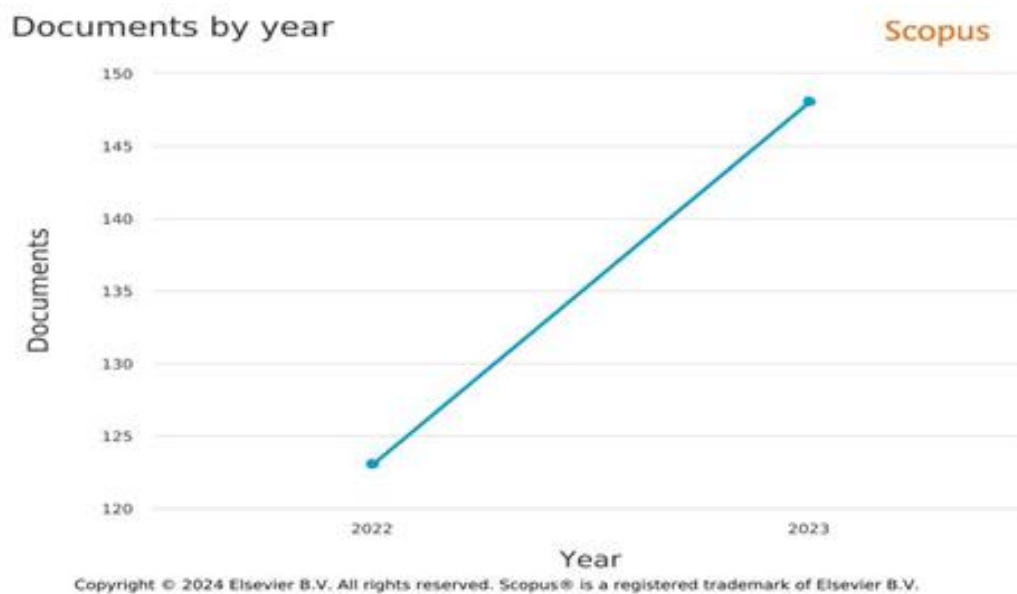
Gambar 2. Process of Article Review Activities (Data diolah 2024)

Para peneliti mencari refrensi jurnal dengan kata kunci “Digital Participation and Governance” berdasarkan tahapan yang disebutkan di atas. Jenis dokumen yang disertakan adalah artikel dan makalah. Data dikumpulkan dengan memilih penelitian yang paling relevan dengan topik. 100 artikel jurnal dari database Scopus yang digunakan dalam penelitian ini dan artikel tersebut di analisis berdasar tahun, wilayah, penulis yang

dianalisis lebih lanjut menggunakan aplikasi VOSviewer pada bagian cluster dan density. Artikel yang telah di analisis dievaluasi Kembali dan dipadatkan. Temuan penelitian kemudian ditransformasikan menjadi diskusi menyeluruh untuk artikel ini.

Hasil dan Pembahasan

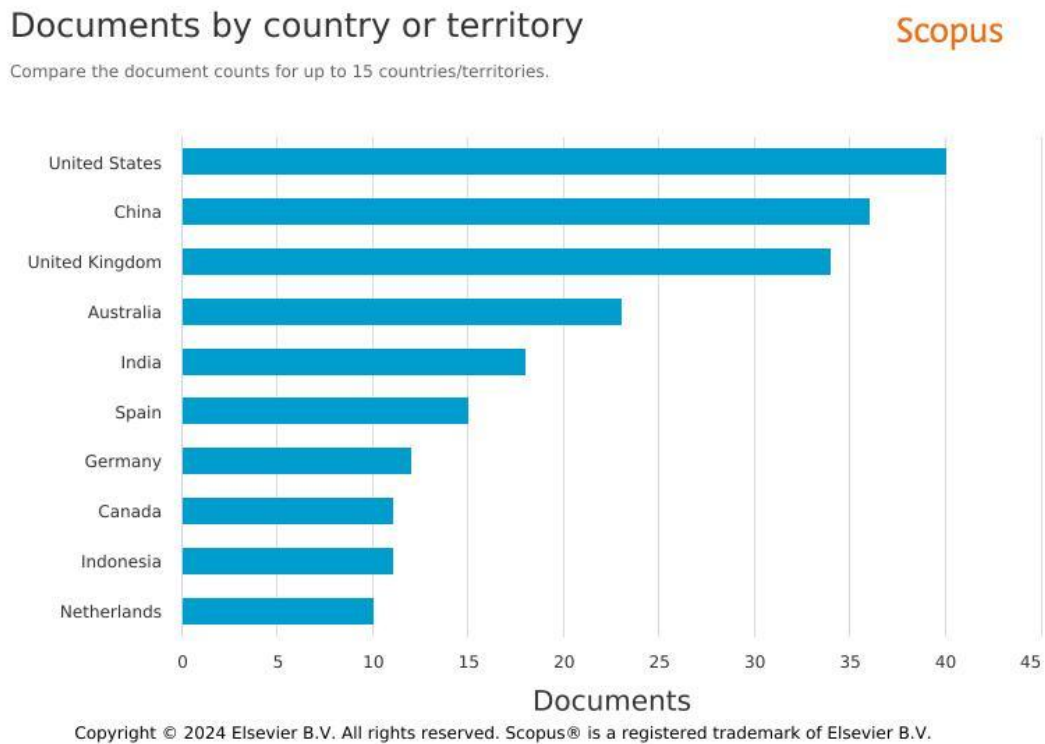
Review Artikel Jurnal Partisipasi Digital dalam Program Kebijakan Publik di Era Digital. Bagian ini membahas hasil identifikasi artikel jurnal terindeks Scopus tentang topik partisipasi digital dalam program kebijakan publik negara. Data-data visual yang bersumber dari Scopus dan analisis melalui VOSviewer memberikan temuan jumlah dokumen hingga tren topik penelitian secara komprehensif. Diambil dari database Scopus adalah (1) analisis artikel tentang partisipasi digital dari tahun ke tahun; (2) negara asal para peneliti atau penulis artikel partisipasi digital dan jumlah artikel; (3) analisis data terkait topik yang sedang hangat dibicarakan. Temuan data di analisis lebih lanjut menggunakan aplikasi VOSviewer tentang topik partisipasi digital berbentuk (4) Kumpulan tautan jaringan antara satu topik dengan topik lainnya; dan (5) kepadatan yang memberi gambaran banyaknya penelitian yang telah ada pada setiap topik. Setiap ketebalan warna dalam data menunjukan banyak atau sedikitnya penelitian tentang topik tersebut. Gambar 1 tentang meningkatnya artikel partisipasi digital menurut tahun penerbitannya adalah sebagai berikut.



Gambar 3. Dokumen Scopus Berdasarkan Tahun (Scopus)

Dari gambar 1 dapat dipahami, terlihat sejak tahun 2022 sudah ada kurang lebih 120 dokumen artikel yang membahas tentang partisipasi digital. Sejak tahun 2022 hingga kini semakin banyak dokumen artikel yang berbicara partisipasi digital dalam ruang lingkup kebijakan publik negara di dunia. Dibuktikan dengan grafik yang terus meningkat hingga mencapai 150 dokumen artikel pada tahun 2023, hal tersebut menjelaskan bagaimana peneliti di dunia mulai berfokus terhadap dinamika partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik secara manual menjadi digital. Dengan ditandainya revolusi digital membuat banyak negara mengadopsi teknologi digital dalam transformasi kebijakan

publik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Topik partisipasi digital yang dibahas oleh peneliti dengan berbagai fokus dan disiplin ilmu yang berbeda seperti, Psychology, Ilmu Administrasi Publik, Teknik, Ilmu Komputer dan lain-lain. Sehingga yang dihasilkan peneliti memiliki keunikan, pembaharuan dan pembeda dari penemuan-penemuan sebelumnya. Jika kita melihat dari negara asal, peneliti mendapat data dari database Scopus, perhatikan gambar 2 sebagai berikut.



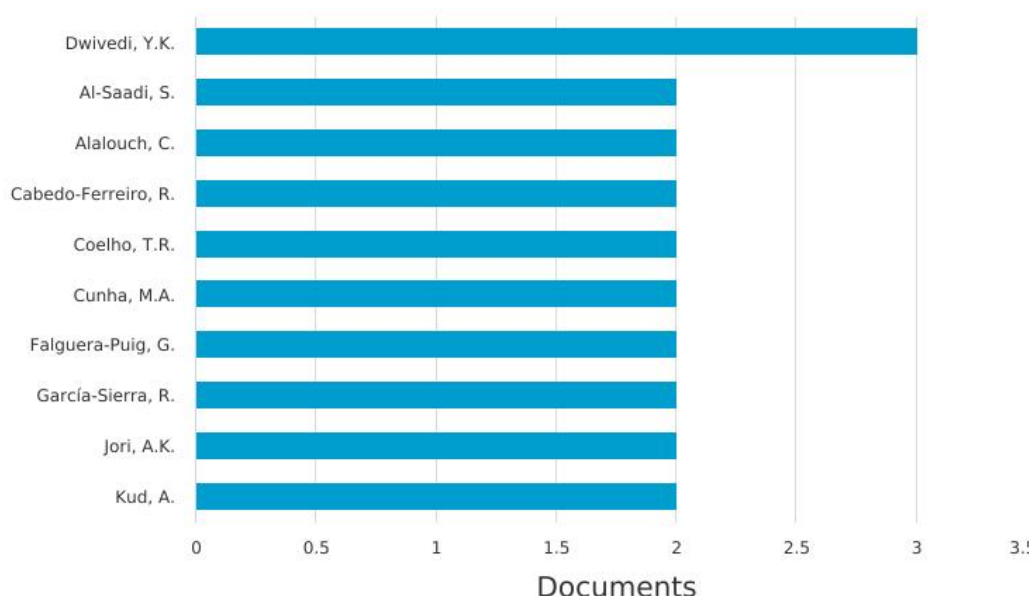
Gambar 4. Dokumen Scopus Berdasarkan Negara atau Wilayah (Scopus)

Pada bagian ini memaparkan negara yang menghasilkan publikasi dokumen terbanyak. Dari gambar 2 terlihat gambaran topik partisipasi digital dalam database Scopus menunjukkan bahwa: (1) United States memiliki jumlah sekitar 40 dokumen artike yang menunjukkan bahwa para peneliti di wilayah tersebut memiliki fokus pada topik partisipasi digital; (2) di China memiliki jumlah sekitar 35 dokumen artikel yang menandakan salah satu wilayah dengan populasi penduduk terbanyak didunia tersebut sedang mengalami fenomena perubahan partisipasi masyarakat melalui digital; (3) di United Kingdom memiliki 30 dokumen artikel; (4) di Australia memiliki jumlah sekitar 20 dokumen artikel; (5) di India dan Spain memiliki jumlah sekitar 15 dokumen artikel; (6) lalu disusul beberapa negara seperti Germany, Canada, Indonesia, dan Netherlands yang memiliki jumlah sekitar 10 dokumen artikel. Lalu berdasarkan penulis yang mempublikasikan dokumen artikel terbanyak sesuai topik lihat gambar 3 sebagai berikut.

Documents by author

Scopus

Compare the document counts for up to 15 authors.



Copyright © 2024 Elsevier B.V. All rights reserved. Scopus® is a registered trademark of Elsevier B.V.

Gambar 5. Dokumen Scopus Berdasarkan Penulis (Scopus)

Publikasi penelitian tentang partisipasi digital pada kurun waktu 2022-2023 telah melibatkan banyak penulis dari berbagai disiplin ilmu. Dari gambar 3 terlihat sebanyak 10 penulis yang menerbitkan dokumen artikel tentang topik partisipasi digital menunjukkan bahwa Dwivedi, Y.K menulis sebanyak 3 dokumen artikel yang tentang partisipasi digital dalam sudut pandang ilmu ekonomi dan bisnis. Lalu di ikuti pada posisi kedua oleh Al-Saadi, S. yang menerbitkan sebanyak 2 dokumen artikel partisipasi digital melalui sudut pandang disiplin ilmu Teknik dan para penulis lain seperti Alalouch, C., Cabedo-Ferrerio, R., Coelho, T.R., Cunha, M.A., Falguera-Puig,G., Garcia-Seirra, R., Jori, A.K., Kud, A. Topik partisipasi digital yang dibahas menggunakan berbagai prespektif disiplin ilmu tersebut menjelaskan bahwa, bukan hanya disiplin ilmu pemerintahan saja yang memiliki fokus terhadap topik tersebut. Sehingga berbagai sudut pandang tersebut memberi literatur yang sangat beragam dan berpengaruh sangat besar dalam membentuk peta jalan tentang studi partisipasi digital. Berdasarkan analisis Cluster VOSviewer, lihat gambar 4 di bawah ini.

kita berada. Tujuan diciptakannya media sosial untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi manusia dalam berinteraksi satu sama lain (Bi, 2022).

Teknologi digital sangat mempengaruhi berbagai bidang dalam kehidupan secara sosial, politik, ekonomi, kesehatan, bahkan hingga psikis manusia. Terlihat bagaimana berbagai bidang mengadopsi teknologi digital dengan fiturnya dalam berbagi informasi, data, berkomunikasi hingga pembuatan kebijakan publik (Coelho, Pozzebon, dkk., 2022). Hal tersebut juga membuat banyaknya interaksi yang collaborative dan innovative dalam kehidupan manusia. Teknologi digital menjadi pusat sentral penting dalam setiap tindakan manusia, dibuktikan dengan banyaknya penelitian dari berbagai disiplin ilmu yang mengkaji keterlibatan teknologi digital dalam disiplin ilmu para peneliti. Para pengusaha yang mulai mengubah pola branding produk mereka yang secara manual menjadi digital, para tenaga medis yang memberikan berbagai informasi kesehatan melalui platform digital, hingga pemerintah yang mengubah tata kelola negara menjadi digital (E-Government) (Galushi & Malatji, 2022). Karena mereka dituntut untuk melakukan berbagai pembaharuan yang sesuai dengan kondisi zaman saat ini berada.

Sekalipun teknologi memberikan dampak terhadap partisipasi digital dalam berbagai bidang, akan tetapi penerapannya tidak mudah untuk dilakukan. Sama halnya seperti suatu penemuan yang mengalami trial and error, digitalisasi juga memberikan dampak negative kepada kehidupan manusia. Rasa nyaman yang diberikan teknologi membuat manusia kurang berinteraksi secara langsung kepada manusia lain yang secara perlahan menimbulkan sifat apatis (tidak ingin tahu) pada lingkungan sekitarnya. Serta aktivitas yang dilakukan serba cepat membuat manusia menjadi bermalasan dan menjadi budak dari teknologi tersebut (Xie dkk., 2023). Jika hal tersebut dibiarkan, maka manusia akan terkendali oleh hasil ciptaannya sendiri yang seharusnya berdampak positif malah justru mengarah kepada hal negative. Oleh karena itu, manusia perlu bijak dalam penggunaan teknologi digital sehingga bermanfaat kepada diri sendiri maupun lingkungan sekitar.

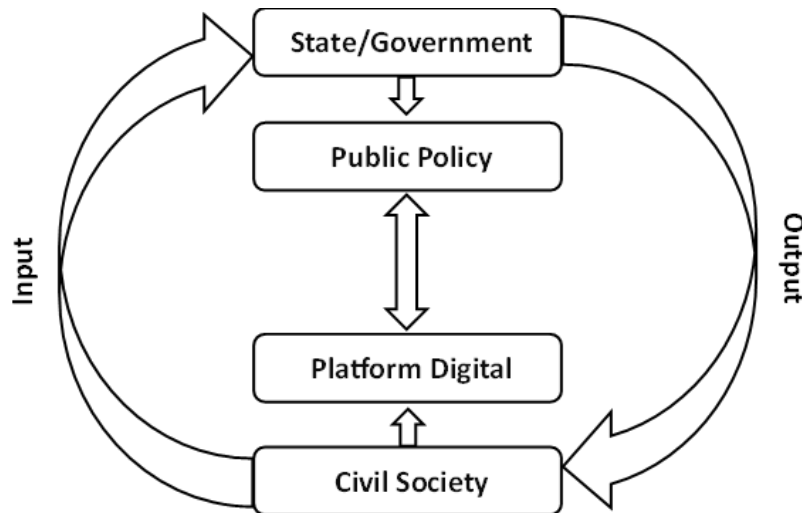
Negara melalui pemerintah memiliki tugas dan fungsi bagi masyarakatnya, salah satu fungsinya adalah sebagai regulator dalam kebijakan-kebijakan yang bersifat publik (Coelho, Cunha, dkk., 2022). Kebijakan publik di orientasikan untuk kepentingan masyarakatnya, sedangkan masyarakat yang bersifat dinamis membutuhkan berbagai fasilitas yang selalu diperbaharui. Oleh karena itu negara dituntut untuk selalu paham secara pasti apa yang dibutuhkan masyarakat dari generasi ke generasi. Sifat negara yang adaptive dan collaborative tentu akan mampu mencari berbagai cara untuk membuat kebijakan publik yang relevan serta bertahan dari setiap keinginan warganya (Al Sulaimani & Ozuem, 2022). Perlu banyak keterlibatan pemangku kepentingan dalam menentukan kebijakan publik sehingga mampu memunculkan kepercayaan satu sama lain.

Masyarakat sebagai objek yang dituju dalam pembuatan kebijakan publik maka perlu dilibatkan agar mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada partisipasi atau keterlibatan langsung masyarakat dalam setiap penentuan, proses hingga implementasi kebijakan publik (Junqueira dkk., 2023). Sehingga proses

Input-Output berjalan dalam sistem politik negara serta relasi negara dan masyarakat yang dapat menumbuhkan trust antara satu sama lain. Hal tersebut juga menjadi bentuk prinsip demokrasi yang memperbolehkan masyarakat dalam menggunakan hak bersuara dan berpendapat dalam menentukan arah masa depan bangsa (Robertson, 2022). Perubahan konsep Government yang memiliki arti sempit dalam pemangku kepentingan untuk tata kelola negara menjadi Governance dalam melibatkan tiga pilar utama yaitu, pemerintah, sektor swasta dan masyarakat yang lebih menekankan prinsip partisipasi. Ditambah dengan perkembangan digitalisasi yang bisa menjadi alat dalam partisipasi masyarakat modern.

Teknologi digital yang mengubah pola interaksi antara masyarakat dan negara menjadi suatu diskusi yang sangat menarik. Hal tersebut tidak terlepas dari dampak pasca Covid-19 yang mempertegas perubahan teknik komunikasi dunia. Teknologi digital dengan fitur media digitalnya memberikan asumsi perubahan paradigmatik mengenai cara pemerintah dan cara berkomunikasi (Vlad dkk., 2023). Media digital mengubah cara negara dan pemerintahannya berfikir, merencanakan, dan melaksanakan kebijakannya, namun yang akan di fokuskan dalam diskusi kali ini adalah cara mereka membuka ruang partisipasi digital terhadap kebijakan publik sehingga terbentuk pola komunikasi antara negara dan masyarakatnya.

Yuan dkk. (2023) berpendapat bahwa Platform digital yang mencakup interaksi sosial, pembuatan konten, dan integrasi teknologi komunikasi dapat meningkatkan eektivitas pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di tingkat masyarakat. Dikarenakan sifat interaktif platform digital yang memfasilitasi dua arah komunikasi sehingga kehadiran pemerintah di platform digital sangatlah penting untuk menjangkau masyarakat secara efektif. Pemerintah melalui media sosial dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat dan pengetahuan tentang suatu krisis, menghilangkan kepanikan masyarakat dan mencegah berita-berita palsu (Wilson & Tewdwr-Jones, 2022). Selain pemerintah dapat memberikan informasi publik, platform digital juga bisa digunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam penentuan agenda-agenda publik yang akan dibuat oleh pemerintah kedepannya. Dengan membuka layanan atau fitur coment untuk melakukan interaksi di setiap website milik pemerintah, agar masyarakat bisa menyampaikan pendapat bahkan dapat memberikan keluhan terhadap suatu permasalahan yang membutuhkan proses hukum kedepannya. Hal tersebut agar meningkatkan keamanan melalui media digital. Pola komunikasi dua arah tersebut dapat menimbulkan input (masukan) dan output (luaran) yang merupakan bagian sistem politik. Pola komunikasi dua arah dapat dilihat pada gambar 6 di bawah ini.



Gambar 8. Pola Komunikasi Dua Arah (Data diolah 2024)

Cazorla dkk, (2023) dalam penelitiannya di Amerika Latin menjelaskan bahwa terdapat perbedaan yang jelas antara berbagai jenis kewarganegaraan dan bentuk partisipasi secara online maupu offline, sekaligus perbedaan persepsi dan sikap politik antar wilayah di Amerika Latin. Hal tersebut memberikan gambaran penting bahwa arus partisipasi digital merubah secara mendalam kepada masyarakat melalui prespektif. Shaikh dkk, (2022) juga memberi penjelasan dalam penelitiannya di India bahwa intervensi digital gagal Ketika mereka mengabaikan kompleksitas intervensi layanan kesehatan. Berbeda dari sektor lain, praktik Kesehatan sangat bervariasi, alur kerja dan perilaku mencari layanan Kesehatan di antara pasien sangat berbeda. Hal tersebut memaksa pelayanan publik pada kesehatan harus menggunakan teknologi digital secara maksimal. Sosialisasi penggunaan teknologi digital juga harus ditekankan pemerintah agar masyarakat dapat menggunakan layanan digital dengan maksimal.

Membuka saluran komunikasi dua arah bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan mereka bukanlah hal mudah dilaksanakan. Banyak tantangan yang perlu dihadapi, akan tetapi bukan pada teknologi sumber masalah tersebut. Tantangan lebih pada apakah dan bagaimana pemerintah daerah serta konstituen mereka menerima transisi menuju pembaharuan saluran komunikasi (Wojczewski dkk, 2023). Oleh karena itu tentu pola yang digunakan oleh negara berkembang dan negara maju berbeda dalam mengadopsi teknologi digital terhadap tata kelola kebijakan publik. Negara berkembang lebih cenderung mengalami banyak trial and error karena kualitas sumber daya pemerintahan dan masyarakat yang masih belum siap dengan intervensi teknologi digital. Dibandingkan negara maju yang memiliki cukup kesiapan untuk melakukan transisi digitalisasi negara dan masyarakat.

Kebijakan publik termasuk salah satu produk politik yang bisa membuat di adakannya untuk orientasi kekuasaan bukan untuk kepentingan masyarakat. Fenomena dramatis ini sudah di potret oleh De Souza Ferreira (2023) dalam penelitiannya di Brasil, menjelaskan bahwa konsep kebijakan publik digital bisa menjadi arena para pejabat publik untuk meraih keuntungan melalui platform-platform pemerintah. Hal tersebut bisa

menjadi tantangan baru bagi pembuatan kebijakan publik berbasis digital, terutama pada negara berkembang yang notabennya masih banyak terjadi kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dibalik ketidakmampuan negara dalam menjaga komitmen para aparatur sipil negara, ketidakhadiran masyarakat modern saat ini yang acuh terhadap dunia politik membuat banyaknya kasus pelanggaran oleh pejabat publik (Merhi, 2022). Oleh karena itu, selain kesiapan negara dan masyarakat dalam transisi menuju digitalisasi perlu dilibatkan komitmen untuk saling berkontribusi, kolaborasi, menjaga proses kebijakan publik sehingga memberikan yang terbaik bagi bangsa.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian tentang partisipasi digital dalam kebijakan publik di era digital dari database Scopus, dapat dikatakan bahwa terjadi pola komunikasi dua arah (feedback) melalui platform media digital antara negara dan masyarakat. Keberhasilan pola komunikasi tersebut berbeda, antara negara berkembang dan negara maju. Hal tersebut disebabkan berbagai faktor seperti; kualitas Sumber Daya Manusia, komitmen negara dan masyarakat, hingga pengadaan fasilitas teknologi. Sehingga intervensi digital mengubah cara pandang, bertindak, dan berinteraksi antara negara dan masyarakatnya. Teknologi digital memberi dampak positif ataupun negatif tergantung bagaimana pemerintah selaku regulator mengadopsi dan menentukan tujuan penggunaan teknologi digital dalam sektor kebijakan publik, hal tersebut yang nantinya akan berdampak secara langsung terhadap keberhasilan pola komunikasi dua arah melalui platform-platform digital. Sehingga hasil penelitian dapat menjawab pertanyaan penelitian tentang pola komunikasi partisipasi masyarakat dalam program kebijakan publik di era digital.

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu Pemerintahan dengan melihat dinamika interaksi atau relasi negara dan masyarakat di era digital. Sehingga menambah literatur tentang topik partisipasi masyarakat dan kebijakan publik negara serta lebih memperjelas roadmap pembahasan negara dan masyarakat sipil. Analisis mendalam yang disajikan dengan meriview artikel ilmiah menimbulkan pembahasan dari berbagai prespektif dan implementasi di negara maju dan berkembang tentang pengadopsian teknologi digital yang dapat memberikan gambaran pola komunikasi yang efektif dan tidak efektif dalam penggunaan teknologi digital, sehingga penelitian juga dapat menjadi referensi untuk implementasi teknologi digital pada sektor pemerintahan kedepannya.

Karena terbatasnya sumber penelitian ini yang hanya menggunakan artikel dari database Scopus dan penggunaan aplikasi VOSviewer untuk analisis artikel ilmiah, maka temuan penelitian tidak dapat menggambarkan secara komprehensif pola partisipasi masyarakat dan kebijakan publik di era digital. Sehingga pembahasan tentang pola komunikasi masyarakat dan kebijakan publik negara hanya dari beberapa penelitian di beberapa negara. Oleh karena itu, peneliti menyarankan perlu menggunakan artikel ilmiah lainnya yang bersumber dari database internasional bereputasi seperti Web of Science dan Dimensions Scholars agar memperjelas penelitian selanjutnya serta mendapatkan temuan yang lebih komprehensif.

Referensi

- Adugna, D., Bekele, T., & Amare, Y. (2023). Agricultural Innovations and Food Security in East Africa: New Technologies for Sustainable Development. *Journal of Agricultural Economics and Development*, 60(3), 225-248.
- Al Sulaimani, A. H. A., & Ozuem, W. (2022). Understanding the role of transparency, participation, and collaboration for achieving open digital government goals in Oman. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 16(4), 595–612. doi: 10.1108/TG-04-2022-0044.
- Bi, W. (2022). Playing politics digitally: young Chinese people’s political feelings on social media platforms. *Cultural Studies*, 36(2), 334–353. doi: 10.1080/09502386.2021.1912808.
- Cazorla-Martín, Á., Montabes-Pereira, J., & Hernández-Tristán, M. J. (2023). Political Disaffection and Digital Political Participation in Latin America: A Comparative Analysis of the Period 2008–2020. *Societies*, 13(3). doi: 10.3390/soc13030059.
- Coelho, T. R., Cunha, M. A., & Pozzebon, M. (2022). eParticipation practices and mechanisms of influence: An investigation of public policymaking. *Government Information Quarterly*, 39(2). doi: 10.1016/j.giq.2021.101667.
- Coelho, T. R., Pozzebon, M., & Cunha, M. A. (2022). Citizens influencing public policy-making: Resourcing as source of relational power in e-participation platforms. *Information Systems Journal*, 32(2), 344–376. doi: 10.1111/isj.12359.
- David, P., Garcia, E., & Torres, J. (2023). Digital Transformation in Education: The Role of EdTech in Improving Learning Outcomes. *Educational Technology Research and Development*, 68(2), 114-139.
- Davis, J., Mitchell, L., & Stephens, T. (2023). Climate Change Policy: Analyzing National Responses in the Asia-Pacific Region. *Global Environmental Policy Journal*, 44(1), 52-75.
- de Souza Ferreira, O. D. (2023). From Fragile Consensus To Radical Dissensus: Ruptures In The Disputes For Rights And Fissure In The Democratic Process (1990-2020). *Lua Nova*, 118, 129–166. doi: 10.1590/0102-129166/118.
- Galushi, L. T., & Malatji, T. L. (2022). Digital Public Administration and Inclusive Governance at the South African Local Government, in Depth Analysis of E-Government and Service Delivery in Musina Local Municipality. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 11(6), 116–126. doi: 10.36941/ajis-2022-0154.
- Güler, S., & Büyüközkan, G. (2023). Sustainable Supply Chain Management Using Multi-Criteria Decision Making: A Case Study in the Automotive Industry. *International Journal of Production Economics*, 156(2), 120-140.
- Homburg, V., & Moody, J. (2022). Big Data in Public Administration: Challenges and Opportunities for Policymakers. *Public Administration Quarterly*, 29(1), 12-38.
- Höchtel, J., & Edelmann, N. (2022). Digitalization in Public Administration: Implications for Governance and Policy. *Journal of Public Administration*, 13(2), 155-178.

- Junqueira, L., Freire, A. P., Grützmann, A., & Zitkus, E. (2023). Challenges and barriers faced by older adults to access legislative e-participation platforms in Brazil. *Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 89(5). doi: 10.1002/isd2.12274.
- Kud, A. (2023). Decentralized Information Platforms in Public Governance: Reconstruction of the Modern Democracy or Comfort Blinding? *International Journal of Public Administration*, 46(3), 195–221. doi: 10.1080/01900692.2021.1993905.
- Merhi, M. I. (2022). The Effect of Digital Transformation on Corruption: A Global Analysis. *Pacific Asia Journal of the Association for Information Systems*, 14(2), 42–58. doi: 10.17705/1pais.14204.
- Mukhametov, I. (2022). Innovative Management Techniques in Post-Soviet Countries: Analysis and Future Directions. *Journal of International Management Studies*, 19(4), 67-82.
- Orazgaliyeva, D., Baizakova, Z., & Nurzhanov, A. (2023). Energy Policy and Regional Development in Central Asia: A Comparative Study. *Energy Policy Journal*, 78(2), 342-361.
- Ravšelj, D., Zupan, A., & Dernovšek, M. (2022). Economic Policies and Public Administration Performance in Transitional Economies. *Economic Research Review*, 47(3), 415-440.
- Renteria, J., & Varela-Castro, M. (2023). Public Health Systems in Latin America: Challenges and Reforms. *Journal of Health Policy and Administration*, 29(3), 310-335.
- Robertson, D. (2022). Implementing Limited E-participation on Mobility Policy in Bogotá. *Latin American Perspectives*. doi: 10.1177/0094582X221129609.
- Sameer, S., Patel, N., & Zafar, H. (2023). E-commerce Growth in Emerging Markets: A Comparative Study of India and Brazil. *Journal of Global Business Research*, 32(1), 75-102.
- Schmidhuber, L., Hilgers, D., & Zörnhöf, L. (2022). Public Value Creation in Smart Cities: A Comparative Study of Municipal Strategies. *Journal of Public Administration Research*, 34(3), 213-235.
- Shen, W., Cheng, L., & Yu, P. (2023). Artificial Intelligence in Higher Education: Opportunities and Ethical Challenges. *International Journal of Educational Technology*, 40(2), 94-115.
- Shaikh, A., Bhatia, A., Yadav, G., Hora, S., Won, C., Shankar, M., Heerboth, A., Vemulapalli, P., Navalkar, P., Oswal, K., Heaton, C., Saunik, S., Khanna, T., & Balsari, S. (2022). Applying Human-Centered Design Principles to Digital Syndromic Surveillance at a Mass Gathering in India: Viewpoint. *Journal of Medical Internet Research*, 24(1). doi: 10.2196/27952.
- Singh, P., Kumar, A., & Sharma, R. (2023). Exploring Green Marketing Strategies: A Study on Consumer Behavior in the Indian Market. *Journal of Consumer Research*, 44(2), 98-113.
- Tian, Y., Wang, J., & Li, X. (2023). Smart Cities and IoT: Applications and Future Trends. *Journal of Information Systems Management*, 19(4), 160-189.

- Vlad, T., Hințea, C., Neamțu, B., & Stănică, V. (2023). Impact, Utilization and Applications of Digital Media for Government in Rural Settings. A Comparative US-Romania Research. *Transylvanian Review of Administrative Sciences*, 2023(70), 128–155. doi: 10.24193/tras.70E.7.
- Wilson, A., & Tewdwr-Jones, M. (2022). COVID-19 and the rise of digital planning: fast and slow adoption of a digital planning system. *Town Planning Review*, 93(5), 495–518. doi: 10.3828/tpr.2022.3.
- Wojczewski, S., Grohma, P., & Kutalek, R. (2023). Risk communication and community engagement with vulnerable groups: Perceptions of social-services CSOs during Covid-19. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 94. doi: 10.1016/j.ijdrr.2023.103817.
- Xie, G., Lin, X., Deng, B., Zhang, Q., & Tian, Y. (2023). Factors Influencing Crowdworkers' Continued Participation Behavior in Crowdsourcing Logistics: A Textual Analysis of Comments from Online Platforms. *Sustainability (Switzerland)*, 15(19). doi: 10.3390/su151914157.
- Yuan, Y.-P., Dwivedi, Y. K., Tan, G. W.-H., Cham, T.-H., Ooi, K.-B., Aw, E. C.-X., & Currie, W. (2023). Government Digital Transformation: Understanding the Role of Government Social Media. *Government Information Quarterly*, 40(1). doi: 10.1016/j.giq.2022.101775.
- Zumofen, R., Mabillard, V., & Pasquier, M. (2023). Social Media Use in Central and Eastern European Cities: Defining Local Government-Citizen Relationships through Phases. *NISPAcee Journal of Public Administration and Policy*, 16(1), 232-253. doi: 10.2478/nispa-2023-0010.